

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian di tingkat nasional dan internasional. Dampak yang paling dirasakan adalah persaingan di seluruh sektor industri dan telah mengubah tatanan daya saing industri menuju kolaborasi global yang dikenal sebagai “*global supply and value chain*”. Sejalan dengan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berlangsung cepat dan berdampak luas dimana ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penentu bagi pembentukan daya saing dan modernisasi industri. Berbagai perkembangan pada tingkat global tersebut telah terbukti memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing sektor industri.

Dunia kini memasuki era globalisasi, dimana terjadinya transkulturasi dan pengembangan pada berbagai bidang yang memfasilitasi pertukaran budaya yang satu dengan yang lainnya. Globalisasi adalah meluas dan meningkatnya hubungan ekonomi, sosial dan budaya yang melewati batas-batas internasional (Robert Jackson & Georg Sorensen, 2013).

Dalam politik internasional terdapat beberapa persoalan penting yaitu hubungan yang tepat antara politik dan ekonomi, pembangunan dan keterbelakangan di dunia ketiga, dan sifat luasnya globalisasi ekonomi (Robert Jackson & Georg Sorensen, 2013). Dalam hal ini masalah disparitas

antara negara maju dengan negara dunia ketiga menjadi agenda ekonomi politik internasional semakin penting. Dalam konteks tersebut kemudian liberalisme ekonomi yang diimplementasikan dalam bentuk kerjasama ekonomi baik bilateral maupun multilateral dengan negara maju, menjadi formula bagi negara berkembang dalam peningkatan kapabilitas perekonomian (Robert Jackson & Georg Sorensen, 2013).

Negara berkembang yang sedang dalam masa pertumbuhan ekonomi seperti Amerika Latin dan sebagian besar negara berkembang lainnya saat ini seperti Korea Selatan, Singapura dan Taiwan sedang menjalankan standar ekonomi nasionalnya seperti negara maju. Indonesia saat ini, secara ekonomi termasuk ke dalam negara dunia ketiga atau negara berkembang yang sedang mencoba untuk menyejajarkan diri dengan negara-negara lain yang telah maju. Salah satunya dengan menjalin kerjasama ekonomi dengan beberapa negara, dalam hal ini Indonesia menjalin kerjasama ekonomi dengan Jepang dalam bentuk IJEPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*) (Bahtiar, 2016).

Semua negara-negara di dunia ikut andil dalam mendorong liberalisasi perdagangan dengan melakukan kerjasama perdagangan bebas baik secara bilateral maupun regional. Secara regional dapat dilakukan dalam skema *Free Trade Area* (FTA). Sedangkan secara bilateral dapat dilakukan dengan *Economic Partnership Agreement* (EPA).

Selama lima dekade, Jepang dan Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik yang sangat erat yang ditandai oleh kayanya hubungan kedua negara di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Sejak

menandatangani perjanjian perdamaian pada tanggal 20 Januari 1958 di Jakarta, kedua negara mengawali hubungan ekonomi dengan kesepakatan damai pembayaran ganti rugi akibat perang. Perjanjian damai membuat Jepang harus memberikan ganti rugi kepada Indonesia sebesar US\$ 223,08 juta, setara dengan ¥ 80,3 miliar kurs saat itu. Selain itu, perjanjian tersebut juga mensyaratkan Jepang untuk menghapus hutang Indonesia sebelumnya sebesar US\$ 176,92 juta, diikuti dengan bantuan ekonomi sebesar US\$ 400 juta (Hadi, 2005).

Hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral dengan Jepang didasari oleh *Treaty on Amity Relations and Commerce* yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 1 juli 1961. Indonesia diwakili oleh menteri luar negeri, Dr. H. Soebandrio. Persetujuan lainnya adalah : *Treaty on air service* 23 januari 1962, *Agreement in science and technology cooperation* 12 januari 1981, dan *agreement on the avoidance of double taxation* 3 maret 1982 (*Buku Agenda Perdagangan Indonesia*, 2007).

Komitmen Jepang di bidang Ekonomi terhadap Indonesia semakin kuat pada masa rezim Orde Baru. Pada era ini, Jepang menempatkan diri sebagai negara yang membantu pembangunan ekonomi rezim Orde Baru yang anti komunis (Hadi, 2005). Komitmen Jepang ini dibuktikan dengan memberikan bantuan pemulihan ekonomi, memainkan peran kunci dalam mengatur penjadwalan kembali hutang-hutang Indonesia melalui IGGI dan mengambil bagian penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia melalui paket ODA (*Official Development Assistance*).

Selama periode 1967-1980, Jepang merupakan investor terbesar di sektor-sektor *non-energi* di Indonesia dalam pemulihan ekonomi dan menguasai 41% investasi modal asing yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia (Hadi, 2005). Sampai dengan bulan Juni 2006, Jepang masih menjadi investor terbesar di Indonesia dengan total nilai kumulatif investasi US\$ 39 milyar di 1.715 proyek dan menguasai pangsa investasi Indonesia sebesar 13% dari total FDI (Herutomo, 2007).

Hubungan kedua Negara juga memiliki interdependensi terhadap satu sama lain. Bagi Indonesia, Jepang adalah mitra ekspor dan impor terbesar dan Indonesia telah merasakan surplus yang besar dalam hubungan perdagangannya dengan Jepang. Sementara bagi Jepang, Indonesia memiliki nilai yang sangat penting terutama sebagai pemasok sumber daya energi untuk industri-industri di Jepang. Selama ini Jepang menggantungkan pasokan energinya dari Indonesia dengan total 24% dari keseluruhan gas Jepang (Bahtiar, 2016).

Dalam *Joint Announcement by the Prime Minister of Japan and the President of the Republic of Indonesia on the Possibility of the Economic Partnership Agreement* antara Indonesia dan Jepang tersebut, yang diumumkan pada tanggal 8 September 2003 Megawati dan Koizumi sepakat untuk menugaskan pejabat di kedua pemerintahan untuk melakukan pertemuan pendahuluan mendiskusikan kemungkinan pembentukan EPA antara Indonesia dan Jepang (President et al., 2004).

Pada tanggal 8 September 2003 pertemuan pendahuluan diadakan di Tokyo, Jepang dan diisi dengan pembahasan mengenai pandangan kedua

negara mengenai FTA (*The Preparatory Meeting on Japan-Indonesia Economic Partnership*, 2003). Pada tanggal 6 November 2004, Kepala Nippon Kaidanren, Hiroshi Okuda mengunjungi Presiden SBY untuk meneruskan kembali pembicaraan mengenai FTA Indonesia dan Jepang, menurut Okuda, dalam pertemuan tersebut SBY menyampaikan komitmennya untuk meneruskan pembicaraan mengenai kerjasama FTA yang sudah dimulai sejak masa pemerintahan Megawati (Kyodo, 2004). Sebelumnya inisiatif Jepang untuk membentuk EPA dengan Indonesia terkait dengan pembentukan EPA dengan ASEAN. Hal ini ditegaskan oleh PM Jepang Koizumi pada saat KTT ASEAN-Jepang di Phnom Penh pada tanggal 5 November 2002, Koizumi menyatakan bahwa untuk dapat melakukan kerjasama FTA di Asia Tenggara harus dilakukan dengan dua level (*two-level Approach*) yakni bilateral dan regional (Yue, 2003).

Di sela-sela pertemuan APEC pada tanggal 20-21 November 2004, Presiden SBY secara resmi menyampaikan kepada PM Koizumi mengenai pentingnya EPA sebagai alat mempromosikan hubungan ekonomi yang lebih dekat diantara kedua negara (Group, 2005). menindaklanjuti pernyataan tersebut pada tanggal 15 Desember 2004 Menteri Ekonomi Jepang Soichi Nakagawa menemui Menko Aburizal Bakrie untuk membicarakan rencana kesepakatan baru yang merupakan lanjutan dari penawaran insentif investasi pengusaha Jepang yang disampaikan kepada Presiden SBY pada pertemuan sebelumnya (Witular, 2004). Keesokan harinya pada tanggal 16 Desember 2004, Nagawa menemui Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan menyepakati untuk membuat

kelompok studi bersama (*Joint Study Group/JSG*) yang bertugas mengkaji dan memberikan penilaian menyeluruh tentang kemungkinan pembentukan FTA, biaya dan keuntungan serta sektor-sektor apa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut (Hakim, 2005).

Kerjasama Jepang dan Indonesia dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2008 . EPA Indonesia-Jepang adalah sebuah *Free Trade Agreement New-Age* (FTA babak baru) yang terdiri dari 13 isu komprehensif dan bersifat WTO Plus (melebihi kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur WTO) ditambah peningkatan kapasitas (*capacity building*) sebagai bagian dari Partnership agreement (Puspitasari, 2011).

Terdapat berbagai barang yang masuk kedalam daftar penurunan/penghapusan tarif bea masuk bagi Jepang dan Indonesia dalam EPA Indonesia-Jepang. Bagi kedua negara ini, penurunan/penghapusan tarif bea masuk merupakan keuntungan yang besar karena kedua negara ini sudah menjadi mitra dagang yang cukup lama dan memiliki hubungan diplomasi yang baik. Bagi Indonesia, Jepang merupakan mitra dagang yang besar, begitupun sebaliknya (Fadhillah, 2016).

Dalam kegiatan ekspor, Indonesia telah sering bergantung pada ekspor migas yang diekspor ke mitra dagang Indonesia, termasuk Jepang. Namun Indonesia juga masih memiliki produk lain yang dapat dijadikan unggulan dalam kegiatan ekspor Indonesia, seperti produk-produk non-

migas yang terus mengalami kenaikan ekspor hingga mencapai surplus. Beberapa produk non-migas yang menjadi unggulan Indonesia untuk di ekspor adalah alaskaki, produk hasil hutan, kelapa sawit, kakao olahan dan biji kakao, kopi, karet dan produk karet, dan tekstil dan produk tekstil (TPT) (*Negara Tujuan Ekspor 10 Komoditi Utama*, 2019).

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu produk unggulan ekspor Indonesia. TPT memiliki peran yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Tercatat pada tahun 2006, TPT memberikan kontribusi sebesar 11,7 persen terhadap total ekspor nasional, 20,2 persen terhadap surplus perdagangan nasional, dan 3,8 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) (Miranti, 2007).

Indonesia, bersama negara-negara ASEAN, juga telah menjadi tempat tujuan bagi kegiatan relokasi industri-industri Jepang. Disamping itu, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang mencapai 200 juta orang, Indonesia juga merupakan pasar terbesar bagi Jepang di kawasan Asia Tenggara (Maruyama, 2007).

Kelebihan dan kekurangan setiap negara dalam memproduksi barang yang dihasilkan adalah alasan mengapa suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain. Hal tersebut dapat dirincikan sebagai faktor atau alasan yang menyebabkan kerjasama antar negara.

Dari pemaparan diatas, penulis akan berupaya menjelaskan dan melakukan penelitian yang lebih menyeluruh dengan mengangkat judul penelitian yakni, **“Implementasi *Indonesia – Japan Economic***

Partnership Agreement (IJEPA) Dalam Ekspor Tekstil Indonesia Ke Jepang

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan pengamatan penulis diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan di atas yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* ?
2. Bagaimana kondisi ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia ke Jepang ?
3. Bagaimana Program IJEPA berpengaruh terhadap meningkatnya ekspor tekstil Indonesia ke Jepang ?

1.2.1. Pembatasan Masalah

Sebagai sebuah usaha untuk menghindari diri dari penulisan ilmiah yang terlampau luas dan tidak terarah dalam topik pembahasan, maka diperlukan pembatasan. Pembatasan masalah dalam penulisan adalah pada **“Implementasi *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* dalam ekspor tekstil Indonesia ke Jepang dan keuntungannya di dalam negeri.”** Ekspor Tekstil Indonesia ke Jepang Periode tahun 2012-2017.

1.2.2. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang sudah disampaikan dalam latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi *Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* Dalam Ekspor Tekstil Indonesia Ke Jepang”**.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hubungan perdagangan Indonesia dan Jepang dalam kerangka *Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*.
- b. Untuk mengetahui kondisi ekspor tekstil Indonesia ke Jepang pasca kerjasama IJEPA.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi IJEPA dalam peningkatan ekspor tekstil Indonesia ke Jepang.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung serta untuk mendapatkan gelar “Sarjana Ilmu Politik (S.IP)”.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah perbendaharaan wawasan pengetahuan studi Hubungan Internasional khususnya berkenaan dengan penelitian terkait.

- c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna di dalam memberikan informasi lebih jauh lagi bagi penulis mengenai kondisi Industri khususnya dibidang tekstil di Indonesia.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam meningkatkan potensi Industri tekstil di Indonesia maupun di Jepang.
- e. Penulis juga berharap dapat memberikan sumbangan dan kontribusi efektif bagi masyarakat mengenai kerjasama Indonesia dengan Jepang melalui IJEPA ini.